

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)
DI KECAMATAN KORONCONG KABUPATEN PANDEGLANG**

**Siti Khaeriyah,
Jumanah,
STIA Banten
Jumanah1011@gmail.com**

Abstract

Women Prone to Socio-Economic have a definition that is an adult married, unmarried, married or widowed woman and does not have enough income to be able to meet basic daily needs. Based on field observations there are several obstacles encountered in the implementation of the assistance program provided. First, the program objectives have not been achieved. Second, limited resources in the implementation of the program. Third, the program benefits have not been absorbed to the maximum. Fourth, there is no change of degree achieved. This type of research is descriptive qualitative, and the sampling method used is purposive sampling technique where sampling technique that only take sampling unit in accordance with the purpose of the researcher, to test the validity of data used triangulation data. Data obtained from several sources through interviews, documentation, and observasi. Harapan future government Pandeglang better in providing appropriate assistance programs to Women Prone Social Economics (PRSE), so the goal of the program can be achieved well.

Keywords: Program Implementation, Women Prone Social Economy (PRSE)

ABSTRAK

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi memiliki definisi yaitu seorang perempuan dewasa status menikah,, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan observasi lapangan terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program bantuan yang diberikan. Pertama, tujuan program belum tercapai. Kedua, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Ketiga, manfaat program belum terserap dengan maksimal. Keempat, belum adanya perubahan derajat yang tercapai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel yang hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan peneliti, untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data. Data diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Harapan kedepan pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi dalam memberikan program bantuan yang sesuai kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Program, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

A. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya. Untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan diperlukan data kemiskinan yang menyeluruh. Perempuan adalah sosok yang rentan mengalami permasalahan baik di wilayah Pedesaan maupun Perkotaan. Akan tetapi, status dan peranan kaum perempuan saat ini telah diakui sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, eksistensi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan negara. Maka dari itu, pengentasan kemiskinan khususnya bagi kaum perempuan harus segera diatasi. Berkaitan dengan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan kebijakan terkait program bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan di Pandeglang. Salah satu program dari beberapa program bantuan yang Pemerintah berikan yaitu mengenai pemberdayaan perempuan, dimana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan bangsa, karena kaum perempuan dengan jumlah yang besar merupakan modal sosial yang potensial bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Dalam hal ini diperlukannya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan atau keterampilan, khususnya pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan salah satu kategori dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkaitan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 06B/ HUK / 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (Lima Puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi merupakan seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun jenis bantuan yang Pemerintah telah terapkan di Kabupaten Pandeglang terkait program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu Pelatihan Tata Boga atau pembuatan kue bagi para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dengan bantuan alat-alat dan bahan-bahan untuk pelatihan Tata Boga tersebut.

Tujuan dari diadakannya bantuan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ini yaitu guna untuk mengatasi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pandeglang dan juga untuk dapat mengurangi jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang tersebar di 35 Kecamatan, Kabupaten Pandeglang.

Kecamatan Koroncong adalah salah satu dari 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 12 Desa, yang menerima bantuan program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Namun ketika di lapangan peneliti menemukan indikasi masalah yaitu sebagai berikut : Pertama, masih ditemukannya kemiskinan di Kecamatan Koroncong, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2015 tercatat 1.759 rumah tangga miskin dari jumlah keseluruhan penduduk 17.920 jiwa. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Kedua, masalah rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Koroncong, tentu hal ini berkaitan dengan masalah masalah kemiskinan yang ada di Kecamatan Koroncong. Tingkat pendidikan di Kecamatan koroncong terlihat bahwa tingkat pendidikan di dominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimana jumlah persentase sebesar 66%. Dikarenakan rendahnya partisipasi sekolah dari masyarakat Kecamatan Koroncong, tentu hal ini menjadi salah satu alasan yang pada akhirnya memunculkan fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya kategori Perempuan Rawan Sosial

Ekonomi (PRSE). Ketiga, bentuk program yang diberikan untuk pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu pelatihan tata boga, hal ini guna untuk dapat melatih kelompok sasaran agar memiliki keahlian di bidang tata boga sehingga dapat mengurangi jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, akan tetapi program bantuan yang diberikan masih kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Keempat, masalah ketidakmerataan bantuan yang Pemerintah berikan untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menjadi salah satu alasan tidak adanya penurunan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dan masalah ini menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) lainnya yang tidak mendapatkan bantuan. Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong.

Mengenai jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, terlihat bahwa adanya kenaikan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Pada tahun 2014 jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebesar 113 perempuan, pada tahun 2015 sebesar 119 perempuan dan pada tahun 2016 sebesar 119 perempuan. Alasan meningkatnya jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal keluarga dimana perempuan yang telah berkeluarga tiba-tiba ditinggalkan suaminya tanpa kejelasan dan tanpa memberi nafkah bertahun-tahun, dan juga faktor ketidakmerataan pemberian bantuan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dari Pemerintah. Mengenai jumlah penerima pelatihan Tata Boga terkait Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) terlihat bahwa adanya ketidakmerataan bantuan program tersebut, dimana dari 119 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) hanya 30 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan program bantuan pelatihan Tata Boga di Kecamatan Koroncong dengan lokasi pelatihan yang berbeda. Kelima, masalah penyalahgunaan bantuan program pemberdayaan dari pihak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dimana program bantuan

tersebut kurang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang dapat dilihat berdasarkan data jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Masalah penyalahgunaan bantuan ini dikarenakan kurang sesuai bantuan yang Pemerintah berikan kepada kelompok sasaran yang dimaksud, salah satu penyalahgunaan yang dilakukan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu seperti menjual bantuan peralatan yang telah diberikan oleh Pemerintah terkait.

Keenam, masalah mengenai keterbatasan anggaran yang Pemerintah berikan terkait bantuan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), sehingga tidak semua kelompok sasaran mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut memicu rasa ketidakadilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Karena setiap program bantuan yang pemerintah berikan tentu menyesuaikan dengan anggaran yang telah pemerintah anggarkan dalam hal ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang. Masalah ini berkaitan dengan masalah ketidakmerataan bantuan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), hal ini dikarenakan anggaran yang dimiliki Pemerintah tidak hanya untuk memberikan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) namun dibagi untuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. (Hasil Observasi, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pra penelitian dengan salah satu masyarakat Kecamatan Koroncong yang tergolong Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan inisial nama 'SR' mengatakan bahwa "Bantuan yang pemerintah berikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) kurang sesuai dengan kebutuhan, dikatakan demikian dikarenakan Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan kue kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) secara berkelompok dan tidak disertai dengan modal yang berbentuk dana tunai. Bantuan yang diharapkan oleh para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu selain adanya alat dan bahan

untuk pelatihan Tata Boga tentu disertai dengan adanya dana tunai sehingga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) bisa mencukupi sebagian kebutuhan pokoknya dan tidak menyalahi aturan untuk tidak menjual bantuan peralatan yang Pemerintah berikan”. (Jumat, 13/01/2017).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

B. LANDASAN TEORI

Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009 : 494 – 495) memberi makna : Implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Ditambahkan pula bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu : langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014 : 141 – 144) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang menada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga perlu diperhitungkan yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam Agustino (2014 : 144 – 149), berpendapat bahwa peran penting

dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi :

1) Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

2) Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

3) Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

4) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara :

1) Kecermatan dan Kejelasan Perjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang Akan Dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

2) Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

3) Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

4) Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

5) Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

6) Kesepakatan para Pejabat terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

7) Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi actor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.

3. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.

2) Dukungan Publik.

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

3) Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

4) Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya.

George Edward III dalam Agustino (2014:149) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Communication / komunikasi
2. Resources / sumber daya
3. Disposition / disposisi
4. Bureaucratic Structure / struktur birokrasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014: 151-152). Dalam

mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber dayanya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: *Pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data keputusan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disuatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut, apakah wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014: 152-153) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias.

2).Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan buku pedoman pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial, Kabupaten Pandeglang tahun (2015 : 11) menyebutkan bahwa:“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat, yang oleh karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar”.

Saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak Korban Tindak Kekerasan, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus,

Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Korban *Trafficking*, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS), Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP), Tuna Susila, Kelompok Minoritas, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Penderita HIV/AIDS, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, dan Korban Bencana Sosial.

3). Pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Adapun kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, yaitu:

1. Perempuan berusia 18-59 tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.

Prosedur Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Berdasarkan buku pedoman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2015, pemberian bantuan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dapat dilaksanakan melalui prosedur-prosedur program yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Program bantuan yang akan diberikan untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dilakukan berdasarkan permintaan data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten kepada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

2. Pengajuan data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang kepada Dinas Sosial Provinsi Banten terkait data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang akan diberikan bantuan berdasarkan Kecamatan.
3. Pembuatan proposal terkait program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang diajukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masing-masing Kecamatan dan ditujukan kepada Gubernur Banten. Proposal direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
4. Merekap seluruh proposal yang telah dibuat dan diajukan, dan tahap akhir yaitu penyeleksian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di salah satu Kecamatan untuk diberikan bantuan berupa pelatihan Tata Boga . Penyeleksian dilakukan berdasarkan kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang benar-benar dianggap lebih membutuhkan bantuan tersebut dilihat dari rendahnya pendapatan ekonomi suatu rumah tangga atau tingkatan suatu ekonomi rumah tangga. Penyeleksian dilakukan karena disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Sosialisasi awal atau bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan yang telah Pemerintah tentukan untuk dilakukannya program bantuan tersebut.
6. Tahap akhir yaitu, pelaksanaan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan yang telah ditentukan.
7. Terdapat tenggang waktu selama tiga sampai empat bulan selama proses pengajuan proposal, bimbingan awal, dan realisasi program.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2007: 6). Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan dengan topic penelitian ini. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi data.

D. PEMBAHASAN

1). Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang yang telah dilaksanakan. Permasalahan mengenai program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah, sehingga menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya mengakibatkan ketidakmerataan pemberian bantuan program tersebut dan tujuan dari program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) belum tercapai dengan maksimal. Hal tersebut dilihat dari berbagai aspek yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari teori Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, George C. Edward III, dan Grindle yang peneliti gunakan, adapun aspek-aspek dalam teori tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang belum tercapai dengan baik, karena dari hasil monitoring yang dilakukan oleh pihak Pemerintah terkait masih ditemukannya beberapa kendala di dalam pelaksanaan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), sehingga jika dipersentasikan baru dapat dikatakan 20% tingkat keberhasilan program yang diberikan dapat tercapai.

2. Dukungan publik dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang sudah baik, yaitu dilihat dari respon dan partisipasi masyarakat khususnya kelompok sasaran yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang menerima bantuan tersebut merasa senang dengan diadakannya pelatihan tata boga selama 3 hari dalam rangka pemberdayaan perempuan dan mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dari awal diadakan kegiatan sampai dengan selesai.
3. Sumber daya dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang masih kurang, hal ini dilihat dari berbagai aspek yaitu adanya keterbatasan anggaran yang pemerintah berikan untuk pelaksanaan program kebijakan, kurangnya jumlah peralatan yang digunakan pada saat pelatihan dan bantuan peralatan yang diberikan masih kurang dan juga kurangnya kesesuaian fungsi peralatan yang digunakan dan diberikan kepada kelompok sasaran pada saat pelaksanaan program bantuan berupa pelatihan tata boga di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.
4. Birokrasi dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang sudah baik, hal tersebut dilihat dari berbagai aspek yaitu telah sesuai proses terkait prosedur penerima bantuan program kebijakan tersebut, dan juga dilihat dari tanggung jawab yang pelaksana berikan dalam pelaksanaan program sudah cukup baik.
5. Tipe manfaat dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang sudah dapat dirasakan sebagian manfaat dari program bantuan tersebut tetapi belum maksimal, karena dilihat dari kurangnya manfaat yang dirasakan dari segi ekonomi, akan tetapi dengan adanya program bantuan berupa pelatihan tata boga dapat menambah ilmu kelompok sasaran di bidang tata boga,

6. Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang belum tercapai secara maksimal, hal tersebut dilihat dari belum terlihat adanya perubahan yang signifikan khususnya dari segi ekonomi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang telah mengikuti dan menerima bantuan program terkait, sehingga hal tersebut berpengaruh pada tidak adanya penurunan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1.2
Matrik Hasil Penelitian

Variabel	Dimensi	Pencapaian
Implementasi Kebijakan	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Banyaknya kendala membuat tujuan program belum tercapai dengan baik
	2. Dukungan Publik	2. Sudah baik
	3. Sumber Daya	3. Masih kurang
	4. Birokrasi	4. Sudah baik
	5. Tipe Manfaat	5. Manfaat sudah dirasakan namun belum maksimal
	6. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai	6. Belum tercapai secara maksimal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah belum tercapainya tujuan dari program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.. Dukungan Publik dikatakan sudah baik dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Adanya beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yaitu keterbatasan sumber daya yang pemerintah miliki, diantaranya keterbatasan anggaran yang diberikan untuk bantuan program yang diberikan, keterbatasan fasilitas yang

diberikan sehingga terdapat ketidaksesuaian fungsi bantuan peralatan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh kelompok sasaran.

Dilihat dari aspek birokrasi dalam implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), sudah baik. Terlihat dari tanggung jawab yang baik yang diberikan implementor terhadap pelaksanaan bantuan program terkait yang dilaksanakan di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Hal lain yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ini yaitu dilihat dari belum terserap secara maksimal manfaat yang dapat diperoleh dari program bantuan yang diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki kelompok sasaran dalam berwirausaha, dimana bantuan yang pemerintah berikan tidak dijadikan sarana untuk berwirausaha

Tidak adanya perubahan signifikan yang terjadi pada kelompok sasaran, khususnya perubahan dalam segi ekonomi dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dan program bantuan yang diberikan tidak berpengaruh pula terhadap penurunan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang ada di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.

E. PENUTUP

1). Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan mengenai implementasi program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, belum sepenuhnya berhasil.

2). Saran

Berdasarkan simpulan di atas, agar pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berjalan dengan lancar maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemilihan kebijakan mengenai program bantuan apa yang hendak dan tepat untuk dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat, sehingga tujuan dari program kebijakan yang dilaksanakan dapat tercapai.
2. Bantuan yang Pemerintah berikan harus direncanakan dengan lebih baik lagi agar kebijakan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, dan dapat berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah kepada kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan agar kelompok sasaran dapat mengetahui dan mengerti bahwa bantuan yang pemerintah berikan bisa bermanfaat dengan baik.
4. Perlu adanya monitoring rutin yang dilakukan oleh pemerintah terkait guna untuk mengetahui program kebijakan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak, sehingga ketika hendak melaksanakan implementasi kebijakan dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- _____. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : UNPAD Press.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Saleh. H.M. 2010. *Pendidikan Non Formal, Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Bandung : Rosda.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.
- _____. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Bumi Kita.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Kedua*. Yogyakarta : CAPS.

Jurnal :

- Nurwati, Nunung. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No. 1, hal 1 – 11 : Bandung.

Dokumen – dokumen :

- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 06B / HUK / 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (Lima Puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Buku Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.
- Buku Data By Name By Adress (BNBA) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2016.

Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Dokumen Pendataan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kecamatan Koroncong.

Dokumen Kependudukan Kecamatan Koroncong.

Media Elektronik :

Evi Alfianti, 2014. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) oleh Dinas Sosial DIY di Hargorejo Kokap Kulonprogo. (https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+pemberdayaan+perempuan&hl=id&biw=1366&bih=578&prmd=nimv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjGyv79s_HRAhXMqo8KHUB9C20Q_AUIBi_gA). Diakses, pada 30 Januari 2017.

Lucya Purnamasari, 2014. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) oleh Dinas Sosial DIY di Hargorejo Kokap Kulonprogo. (https://www.google.co.id/search?q=skripsi+tentang+pemberdayaan+perempuan&hl=id&biw=1366&bih=578&prmd=nimv&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjGyv79s_HRAhXMqo8KHUB9C20Q_AUIBi_gA). Diakses, pada 30 Januari 2017.

Badan Pusat Statistik, 2012. Kriteria Keluarga Miskin. (<http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz22gkVZivw>).